



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**DINAS SOSIAL**

PERUBAHAN RENCANA KERJA

**RENJA - 2024**



**#** bangga  
melayani  
bangsa

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#DINSOS**  
Hadir

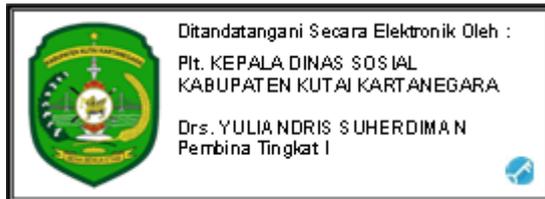
## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat perkenan Rahmat-Nya Dokumen **Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2024** dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan untuk kurun waktu lima tahunan. Dokumen ini menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Dinas Sosial sekaligus rujukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah oleh karenanya memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai setiap tahun yang mengalami perubahan karena penyesuaian dengan kondisi yang terjadi di lapangan, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan sempurna dalam penyusunan dokumen ini. Oleh karena itu saran perbaikan dari semua pihak yang berkompeten sangat kami hargai.

Akhirnya semoga dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tenggarong, 14 Agustus 2024



## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL           SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024</b>	<b>10</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_Dinas Sosial	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	18
<b>BAB III    RENJA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN           PERANGKAT DAERAH</b>	<b>20</b>
3.1 Program dan Kegiatan	20
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	<b>34</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial, warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Untuk dapat memberikan pelayanan kepada PMKS secara komprehensif dengan mengedepankan aspek efektifitas dan efisiensi, maka diperlukan sebuah dokumen perencanaan yang memadai.

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyelenggarakan urusan wajib sosial, sebagai upaya mendukung tercapainya masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Isu penting untuk mencapai masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera yang menjadi kewenangan Dinas Sosial adalah peningkatan penanganan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran Dinas Sosial yaitu meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya untuk kelompok Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis serta Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dalam pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar dengan indikator persentase PMKS yang tertangani pelayanan kebutuhan dasarnya. Hal ini untuk mendukung sasaran strategis daerah sekaligus terkait dengan program KUKAR IDAMAN yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak mulia.

Pencapaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2022 sebesar 97,63 % dari total populasi yang harus mendapatkan pelayanan sebanyak 21.931 jiwa dan terlayani kebutuhan dasarnya sebanyak 21.412 jiwa. Selanjut pada tahun 2023 mengalami peningkatan dimana dari total populasi Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis serta Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang ada sebanyak 15.188 jiwa terlayani seluruhnya atau sebesar 100%. Sedangkan untuk tahun 2024 sampai dengan Semester 1 untuk pelayanan dasar kepada Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis serta Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial terlayani sebanyak 4.166 jiwa dari total populasi yang harus dilayani sebanyak 7.290 jiwa atau sebesar 56,45 % dan ditargetkan sampai dengan akhir tahun anggaran akan terlayani seluruhnya sebesar 100%.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah bagian dari dokumen perencanaan OPD untuk tahun 2024 yang disusun dalam rangka memenuhi beberapa kebutuhan yang belum terakomodir pada Renja Perangkat Daerah 2024 akibat dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan memerlukan penyesuaian dengan kondisi lapangan. Terutama dalam pemenuhan standar pelayanan bidang urusan sosial sehingga diperlukan penambahan anggaran dan penyesuaian target capaian kinerja. Selanjutnya dokumen perubahan ini akan digunakan sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024. Dokumen ini juga akan menjadi panduan dalam merencanakan kinerja tahunan yang akan disajikan dalam Rencana Kerja Perubahan pada tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Bentuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Rencana Kerja OPD untuk tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang sangat erat antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa dan amanat yang dituangkan dalam UUD 1945 yang kemudian diturunkan dalam beberapa aturan perundangan dibawahnya. Landasan hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara,

- Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

- Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
  14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Nomor 1114);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten / Kota Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
23. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
24. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 nomor 7)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
32. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 adalah :

- a. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial ini dimaksudkan sebagai :
  1. Upaya Penyesuaian terhadap perkembangan keadaan dalam pelaksanaan Program Kegiatan yang telah disusun diawal Tahun Perencanaan, yang mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan.
  2. Upaya pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang belum terakomodir pada Rencana Kerja 2024 dan tambahan untuk kekurangan pembiayaan beberapa kegiatan yang bersifat mendesak.
  3. Upaya Penyesuaian rencana target capaian Renstra SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

- b. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial ini bertujuan:
1. Menyediakan dokumen perencanaan yang lebih operasional baik dalam pelaksanaan, pengendalian maupun evaluasi pencapaian target yang ditentukan.
  2. Terwujudnya koordinasi dan keterpaduan sinergis dalam pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Naskah Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan RAPBD

#### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA\_Dinas Sosial

Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Sosial memuat penjelasan terhadap hasil RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan memuat uraian garis besar mengenai program dan kegiatan, meliputi :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan perubahan Renja, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

## BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Sosial**

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Sosial melalui analisis terhadap kinerja output dan kinerja keuangan. Pencapaian kinerja output akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, sedangkan pencapaian kinerja keuangan akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output. Capai Kinerja Dinas Sosial sampai dengan bulan Juni 2024 atau Triwulan II berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan pada aplikasi e-pantau, untuk Realisasi Fisik (Pelaksanaan) sampai dengan Triwulan II sebesar 52,7 % sedangkan untuk realisasi anggaran dari Total Anggaran sebesar Rp. 44.596.627.447,- terealisasi sebesar Rp. 16.358.726.962,- atau sekitar 36,7 %. Dengan memperhatikan kondisi yang ada saat ini Dinas Sosial akan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang ada sampai dengan akhir tahun anggaran dan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal dan program dedikasi KUKAR IDAMAN serta pelaksanaan operasional pelayanan rutin administrasi perkantoran maka perlu adanya rasionalisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah 2023 dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024**

Perangkat Daerah	: Dinas Sosial											
Urusan	: Sosial											
Kode	Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-PD) Tahun 2022	Realisasi Target Hasil Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target RENJA-PD Tahun (2024)	Realisasi RENJA-PD Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7)	11 = (10/4)		
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah										
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan pada Dinas Sosial	88 Dokumen	34 Dokumen	25	13	52%					
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	5	3	60%	1 Dokumen tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada waktu review renstra di akhir tahun, jadi dari target 6 Dokumen menjadi 5 Dokumen	5	50%		
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54 Laporan	24 Laporan	12	6	50%		30	56%		
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	8 Laporan	8	4	50%		12	50%		
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan pada Dinas Sosial										
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4740 Orang	1896 Orang	1106	632	57%		2528	53%		
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Larpoan	24 Laporan	12	6	50%		30	50%		
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	26 Laporan	4 Laporan								
1.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	4 Laporan	4	2	50%		6	30%		
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	0 Laporan	2	1	50%		1	17%		
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	20 Dokumen	8 Dokumen								
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	660 Paket	0 Paket	270	157	58%		157	24%		
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20 Dokumen	8 Dokumen	2	1	50%		9	45%		
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	0 Orang	15	0	0%		0	0%		

Kode	Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-PD) Tahun 2022	Realisasi Target Hasil Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target RENJA-PD Tahun (2024)	Realisasi RENJA-PD Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7)	11 = (10/4)
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	20 Paket	5	5	100%		25	50%
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	40 Paket	20	20	100%		60	60%
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	40 Paket	6	3	50%		43	43%
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	10 Paket	4	4	100%		14	56%
1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100 Paket	40 Paket	10	8	80%		48	48%
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan	150 Laporan	300	200	67%		350	78%
1.06.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 Dokumen	1000 Dokumen	250	150	60%		1150	46%
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	2 Dokumen	1	1	100%		3	75%
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah								
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	2	0	0%		0	0%
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	415 Paket	50 Paket	215	200	93%		250	60%
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	500 Unit	48 Unit	228	200	88%		248	50%
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	135 Laporan							
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	6 Laporan	1	1	100%		7	47%
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12	6	50%		30	50%
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12	6	50%		30	50%

Kode	Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-PD) Tahun 2022	Realisasi Target Hasil Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target RENJA-PD Tahun (2024)	Realisasi RENJA-PD Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7)	11 = (10/4)
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah								
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	49 Unit	30 Unit	7	3	43%		33	67%
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	10 Unit	29	15	52%		25	86%
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	350 Unit	116 Unit	78	50	64%		166	47%
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	1 Unit	7	5	71%		6	50%
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200 Unit	80 Unit	41	20	49%		100	50%
<b>1.06.02</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial</b>								
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga atau Perorangan peserta Sosialisasi								
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Kepmen 050 5889	5 Dokumen	2 Dokumen	1	0	0%		2	40%
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan								
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	120 Orang	60	30	50%		150	50%
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	40 Orang	20	20	100%		60	60%

Kode	Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-PD) Tahun 2022	Realisasi Target Hasil Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target RENJA-PD Tahun (2024)	Realisasi RENJA-PD Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7)	11 = (10/4)
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1185 Lembaga	237 Lembaga	237	237	100%		474	40%
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Sertifikat	5 Sertifikat	5	0	0%		5	33%
<b>1.06.03</b>	<b>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan</b>								
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan								
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	100 Orang	3	1	33%	akan dilakukan pengurangan anggaran (perjalanan dinas pemulangan pekerja migran tindak kekerasan), karena penerima layanan tidak ada dan pengurangan anggaran dialihkan ke sub kegiatan lainnya	101	40%
<b>1.06.04</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)</b>								
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial								
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	3452 Orang	1052 Orang	800	698	87%	Bantuan Pangan bagi keluarga pra sejahtera Program Dedikasi KUKAR IDAMAN; Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1750	51%
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	400 Orang	200	81	41%	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	481	48%
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	730 Orang	280 Orang	150	0	0%	Bantuan Alat Bantu bagi keluarga pra sejahtera Program Dedikasi KUKAR IDAMAN; Standar Pelayanan Minimal (SPM)	280	38%

Kode	Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-PD) Tahun 2022	Realisasi Target Hasil Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target RENJA-PD Tahun (2024)	Realisasi RENJA-PD Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun berjalan 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7)	11 = (10/4)
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	100 Orang	50	52	104%	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	152	30%
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	200 Orang	118	81	69%	karena peserta lomba evennya tidak ada tersedia.akan dilakukan penghitungan ulang untuk kebutuhan anggaran,sementara pembayaran yang ada hanya untuk petugas kebersihan; Standar Pelayanan Minimal (SPM)	281	56%
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	225 Orang	20 Orang	50	8	16%	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	28	12%
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	200 Orang	100	892	892%	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1092	218%
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial								
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	325 Orang	100 Orang	75	61	81%		161	50%
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	400 Orang	200	38	19%		438	44%
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	400 Orang	200	38	19%		438	44%
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	40 Orang	20	0	0%		40	40%
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	100 Orang	50	38	76%	Perlu dilakukan penghitungan ulang untuk kebutuhan anggaran kegiatan, anggaran yang tersedia hanya untuk pembayaran petugas kebersihan	138	28%
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	200 Orang	100	33	33%		233	47%
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	4 Dokumen	2	2	100%		6	60%

Kode	Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-PD) Tahun 2022	Realisasi Target Hasil Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target RENJA-PD Tahun (2024)	Realisasi RENJA-PD Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7)	11 = (10/4)
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial								
		Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial								
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Anak Terlantar yang Terpelihara								
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	50 Orang	25	10	40%	Panti Odah Ngasoh Kanak Program Dedikasi KUKAR IDAMAN; Standar Pelayanan Minimal (SPM)	60	48%
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola								
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata Kep	175000 Orang	175000 Orang	175000	129308	74%		304308	174%
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	40919 Orang	40919 Orang	40919	61138	149%		102057	249%
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	14480 Orang	14480 Orang	7187	739	10%	Santunan/ Bansos bagi keluarga pra sejahtera Program Dedikasi KUKAR IDAMAN; Standar Pelayanan Minimal (SPM)	15219	105%
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	850 Orang	461 Orang	125	0	0%		461	54%
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten								
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Penerima Perlindungan Sosial								
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	7500 Orang	3000 Orang	1500	528	35%	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	3528	47%
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	7500 Orang	3000 Orang	1500	519	35%	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	3519	47%
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	0 Orang	50	0	0%	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	0	0%

Kode	Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Indikator Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-PD) Tahun 2022	Realisasi Target Hasil Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target RENJA-PD Tahun (2024)	Realisasi RENJA-PD Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7)	11 = (10/4)
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang diberdayakan dalam kesiapsiagaan Bencana								
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Kampung	4 Kampung	4	0	0%		4	20%
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	25	12	48%		37	148%
<b>01.06.07</b>	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Di Kelola</b>								
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara								
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2	1	50%		3	150%
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	2 Makam	2	1	50%		3	150%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Gambaran umum capaian indikator kinerja kunci pelaksana urusan wajib Bidang Sosial sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/313/OTDA tanggal 24 Januari 2019 adalah tabel sebagai berikut :

**Tabel.2 - Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Pelaksana Urusan Wajib Bidang Sosial Sampai Dengan Triwulan II dalam Tahun 2024**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA-Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2024	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100	95,48	100	100	Data yang ada perlu di verifikasi dan validasi ulang
2	Persentase (%) Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100	94,11	100	100	
3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100	55,75	100	100	Data yang ada perlu di verifikasi dan validasi ulang
4	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase (%) Korban Bencana alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten	100	100	100	100	100	100	100	100	

Pencapaian target kinerja pelayanan kesejahteraan sosial saat ini masih akan mendapatkan tantangan dimasa yang akan datang. Tantangan tersebut berasal dari kecenderungan berkembangnya jenis dan jumlah

penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya aparatur yang berlatar belakang pendidikan profesi pekerjaan sosial dan ilmu kesejahteraan sosial. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Program dan Kegiatan**

a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

##### **1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang sosial. Pelaksanaan kewenangan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal, Misi Kepala Daerah yang dibebankan Kepada Dinas Sosial diantaranya :

- a) Memantafkan birokrasi yang bersih, efektif, efesien dan melayani.
- b) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya.

##### **2. Pencapaian SDGs**

Dalam hal pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan Dinas Sosial memberikan kontribusi dalam penanganan dan upaya penegentasan kemiskinan. Terlihat dari beberapa program dan kegiatan yang disasarkan kepada kelompok marginal. Dalam hal penanganan kemiskinan, masyarakat Kutai Kartanegara yang masuk didalam Basis Data Terpadu Kemiskinan memperoleh bantuan Sosial juga dari Kementerian Sosial RI melalui Program PKH dan BPNT dimana Kabupaten memiliki kewajiban mendukung kegiatan pendampingan terhadap pelaksanaan program tersebut.

##### **3. Pengentasan Kemiskinan.**

Upaya pengentasan kemiskinan sesungguhnya tidak mungkin

dibebankan kepada Dinas Sosial saja Karena dari sisi kriteria kemiskinan sendiri terdapat beberapa bagian merupakan tanggung jawab instansi terkait lainnya. Dinas Sosial berfungsi lebih kepada upaya pemenuhan Jaminan Hidup dan fasilitasi terhadap aksesibilitas warga miskin dalam memperoleh pelayanan yang layak. Oleh karena itu kolaborasi antar seluruh stake holder terkait sangat diperlukan dalam memecahkan masalah pengentasan kemiskinan. Dan harapannya Dinas Sosial ada digarda terdepan dalam upaya upaya tersebut, bukan berarti sebagai penanggungjawab utama tetapi lebih kepada perumusan strategi penanganan kemiskinan yang tepat dan sesuai dengan karakter kemiskinan wilayah. Selanjutnya terkait dengan 23 Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, keterlibatan Dinas Sosial dalam program kesejahteraan sosial IDAMAN.

#### 4. Pencapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang menjadi tanggung jawab instansi Sosial di daerah menurut Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang SPM bidang Sosial Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota diantaranya :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial.
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial.
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Dalam hal ketersediaan anggaran Perangkat daerah telah berupaya melakukan pemenuhan terhadap SPM tersebut.



b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

1. Pada tahun anggaran 2024 Jumlah Program yang dilaksanakan Dinas Sosial sebanyak 7 Program dengan 18 kegiatan dan 61 Sub Kegiatan
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial menyesuaikan jenis, target dan sasaran program maupun kegiatan, Lokasi kegiatan bisa bersifat menyeluruh di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Kegiatan yang bersifat pendampingan dan ada juga yang terfokus ke satu Kecamatan atau Desa jika jenis kegiatannya bersifat Pelatihan Ketrampilan.

3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif APBD 2024 sebesar Rp. 44.596.627.447,- bertambah sebesar Rp. 5.412.396.518,- menjadi Rp. 50.009.023.965,- pada RKPD - Perubahan untuk memenuhi kebutuhan yang belum terakomodir dan pemenuhan Kebutuhan yang bersifat mendukung pelayanan publik dan program dedikasi KUKAR IDAMAN.
- c. Tabel Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Sosial tahun 2024 dan Perkiraan maju Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara :

**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  
PADA APBD - P TAHUN 2024**

Kode	Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	APBD 2024 (Sebelum Perubahan)				APBD Perubahan 2024 (Sesudah Perubahan)				Bertambah / Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai	21.437.197.857,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai	23.050.938.375,00	1.613.740.518,00	82 Nilai	13.532.212.074,00
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan pada Dinas Sosial	12 Bulan	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan pada Dinas Sosial	12 Bulan	465.000.000,00	(35.000.000)	12 Bulan	650.000.000,00
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	165.000.000,00	(35.000.000)	3 Dokumen	450.000.000,00
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	100.000.000,00	-	6 Laporan	50.000.000,00
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	200.000.000,00	-	8 Laporan	150.000.000,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan pada Dinas Sosial	12 Bulan	11.807.027.460,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan pada Dinas Sosial	12 Bulan	11.757.027.460,00	(50.000.000)	12 Bulan	11.608.906.176,00
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/Bulan	11.482.027.460,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/Bulan	11.482.027.460,00	-	79 Orang/Bulan	11.298.906.176,00
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	325.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	275.000.000,00	(50.000.000)	12 Laporan	140.000.000,00
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	189.460.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	189.460.000,00	-	6 Dokumen	170.000.000,00

1.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	89.460.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	89.460.000,00	-	4 Laporan	30.000.000,00
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Prov. Kaltim, DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Prov. Kaltim, DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	100.000.000	-	2 Laporan	100.000.000,00
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	2 Dokumen	580.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	3 Dokumen	680.000.000,00	100.000.000	2 Dokumen	40.000.000,00
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	157 Paket	280.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	270 Paket	380.000.000,00	100.000.000		
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	100.000.000,00	-	2 Dokumen	40.000.000,00
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DKI Jakarta, Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	200.000.000,00	DKI Jakarta, Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	200.000.000,00	-		
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Layanan	1.402.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Layanan	1.441.984.400,00	39.984.400	7 Layanan	94.357.200,00
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	60.000.000,00	-		5.110.200,00
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	97.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	97.000.000,00	-		59.247.000,00
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Jenis	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Jenis	250.000.000,00	100.000.000		30.000.000,00
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	295.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	295.000.000,00	-		19.986.600,00
1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paekt	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paekt	195.000.000,00	45.000.000		29.998.000,00
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta, Prov. Kaltim, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 OH	300.000.000,00	DKI Jakarta, Prov. Kaltim, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 OH	300.000.000,00	-		200.000.000,00
1.06.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen	181.464.400,00	(68.535.600)		30.000.000,00
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	63.520.000,00	(36.480.000)		20.000.000,00

1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	2.944.981.821,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	4.163.377.939,00	1.218.396.118	100%	42.950.000,00
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	603.936.518,00	603.936.518	-	-
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	215 Unit	540.832.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	215 Unit	540.832.000,00	-	-	-
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	200 Unit	2.404.149.821,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	200 Unit	3.018.609.421,00	614.459.600	-	42.950.000,00
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.293.878.576,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.293.878.576,00	-	12 Bulan	767.586.698,00
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	8.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	8.000.000,00	-	-	2.299.000,00
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	316.485.288,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	316.485.288,00	-	-	193.239.174,00
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	969.393.288,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	969.393.288,00	-	-	572.048.524,00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.719.850.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3.060.210.000,00	340.360.000	100%	158.412.000,00
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	470.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	470.000.000,00	-	-	90.180.000,00
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	315.360.000,00	15.360.000	-	34.010.000,00
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	75.000.000,00	-	-	34.222.000,00
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1.805.000.000,00	305.000.000	-	3.000.000.000,00
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 Unit	374.850.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 Unit	394.850.000,00	20.000.000	-	-

1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	88%	7.814.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	88%	7.814.000.000,00	-	92%	6.120.000.000,00
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Lembaga atau Perorangan peserta Sosialisasi	50 Orang	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Lembaga atau Perorangan peserta Sosialisasi	50 Orang	75.000.000,00	-	50 Orang	75.000.000,00
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Kepmen 050 5889	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Kepmen 050 5889	1 Dokumen	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PSKS yang dikembangkan	70 Orang	7.739.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PSKS yang dikembangkan	317 Orang	7.739.000.000,00	-	317 Orang	6.045.000.000,00
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	200.000.000,00	-	-	400.000.000,00
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	750.000.000,00	-	-	400.000.000,00
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	237 Lembaga	6.739.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	237 Lembaga	6.739.000.000,00	-	-	5.245.000.000,00
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulang	100%	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulang	100%	50.000.000,00	(50.000.000)	100%	50.000.000,00
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	5 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	3 Orang	50.000.000,00	(50.000.000)	3 Orang	50.000.000,00
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	50.000.000,00	(50.000.000)	-	50.000.000,00

1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100%	5.859.089.590,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100%	5.299.105.590,00	(559.984.000)	100%	4.538.500.000,00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	200 Orang	5.144.089.590,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	1180 Orang	4.553.406.590,00	(590.683.000)	1180 Orang	4.183.500.000,00
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Perumahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	800 Orang	3.235.700.590,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	800 Orang	3.368.500.590,00	132.800.000		3.508.500.000,00
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	250.000.000,00	-		150.000.000,00
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	465.000.000,00	(135.000.000)		525.000.000,00
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	211.102.000,00	61.102.000		150.000.000,00
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	118 Orang	733.389.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	83.804.000,00	(649.585.000)		310.000.000,00
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	75.000.000,00	-		-
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000,00	-		100.000.000,00

1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	50 Orang	715.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	344 Orang	745.699.000,00	30.699.000	344 Orang	355.000.000,00
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	100.000.000,00	-		75.000.000,00
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200.000.000,00	-		200.000.000,00
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	60.770.000,00	(19.230.000)		80.000.000,00
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	60.000.000,00	-		60.000.000,00
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000,00	-		100.000.000,00
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	149.929.000,00	49.929.000		100.000.000,00
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	75.000.000,00	-		75.000.000,00

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial	100%	6.886.340.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial	100%	10.572.980.000,00	3.686.640.000	100%	12.947.600.000,00
		Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	85%			Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	85%		-	98%	
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Anak Anak Terlantar yang Terpelihara	25 Orang	645.640.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Anak Anak Terlantar yang Terpelihara	25 Orang	630.280.000,00	(15.360.000)	25 Orang	7.163.800.000,00
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	645.640.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	630.280.000,00	(15.360.000)	25 Orang	1.000.000.000,00
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola	2 Dokumen	6.240.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola	2 Dokumen	9.942.700.000,00	3.702.000.000	2 Dokumen	5.783.800.000,00
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata Kep	175000 Orang	380.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata Kep	175000 Orang	380.000.000,00	-		380.000.000,00
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	40919 Keluarga	369.850.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	40919 Keluarga	369.850.000,00	-		500.000.000,00
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1358 Keluarga	4.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1257 Keluarga	8.202.000.000,00	3.702.000.000		4.903.800.000,00
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	990.850.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	990.850.000,00	-		250.000.000,00

1.06.06	Program Penanganan Bencana	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100%	1.050.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100%	1.360.000.000,00	310.000.000	100%	4.175.000.000,00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Penerima Perlindungan Sosial	1500 KK	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Penerima Perlindungan Sosial	1500 KK	820.000.000,00	270.000.000	1500 KK	1.050.000.000,00
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 KK	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 KK	420.000.000,00	120.000.000	1500 KK	600.000.000,00
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 KK	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 KK	250.000.000,00	-	1500 KK	300.000.000,00
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	150.000.000,00	150.000.000	-	150.000.000,00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang diberdayakan dalam kesiapsiagaan Bencana	1 Desa / Kelurahan	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang diberdayakan dalam kesiapsiagaan Bencana	4 Desa / Kelurahan	540.000.000,00	40.000.000	4 Desa / Kelurahan	3.125.000.000,00
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Muara Badak, Kota Bangun, Samboja	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kampung	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Muara Badak, Kota Bangun, Samboja	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kampung	100.000.000,00	-	4 Kampung	750.000.000,00
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Orang	440.000.000,00	40.000.000	23 Orang	475.000.000,00

01.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sanga-Sanga	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Di Kelola	100%	1.450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sanga-Sanga	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Di Kelola	100%	1.862.000.000,00	412.000.000	100%	1.900.000.000,00
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga-Sanga, Sanga-Sanga Dalam	Jumlah TMP yang dipelihara	2 Makam	1.450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga-Sanga, Sanga-Sanga Dalam	Jumlah TMP yang dipelihara	2 Makam	1.862.000.000,00	412.000.000	2 Makam	1.900.000.000,00
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga-Sanga, Sanga-Sanga Dalam	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga-Sanga, Sanga-Sanga Dalam	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1.700.000.000,00	350.000.000	4 Dokumen	1.500.000.000,00
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sanga-Sanga	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sanga-Sanga	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	162.000.000,00	62.000.000	2 Makam	400.000.000,00
	<b>TOTAL PAGU ANGGARAN</b>				<b>44.596.627.447,00</b>				<b>50.009.023.965,00</b>	<b>5.412.396.518</b>		<b>43.263.312.074,00</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 , proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian ;

1. Data Terpadu Kesejahteraan Spsial (DTKS) akan dilakukan verifikasi dan validasi ulang agar kelompok penerima manfaat terhadap berbagai program bantuan social tepat sasaran.
2. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial
3. Keterbatasan sarana prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Kecenderungan peningkatan jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Kurangnya sinergi stakeholders dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

b. Kaidah - kaidah pelaksanaan ;

Berdasarkan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk kurun waktu satu tahun. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara kurun waktu 2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra perlu dievaluasi berkala untuk menjamin bahwa target kinerja yang telah disusun masih relevan dengan kebutuhan perkembangan permasalahan sosial.

c. Rencana tindak lanjut ;

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah berisi perencanaan strategis yang bersifat operasional dalam menterjemahkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Peragkat Daerah nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi unit kerja di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun rencana kerja tahunan yang ditandai dengan dituangkannya lokasi,

sasaran dan indikator kinerja out put dan out come dari setiap kegiatan. Perencanaan strategis ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, sehingga peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi dapat tercapai. Akhirnya semoga Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Akhirnya semoga Dokumen Perubahan RENJA tahun 2024 ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.

Tenggarong, 14 Agustus 2024

